

Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional

**Sri Darma Yanti Gultom¹, Zahrotul Ubbah Hrp², Ariana Puspita Daulay³,
Dinda Zahra Auliya⁴, Dinda Sri Hanifah Harahap⁵, Siti Syahirah Tarigan⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: darmayanti0308232022@uinsu.ac.id¹, zahrotul0308232034@uinsu.ac.id²,
arianapuspita265@gmail.com³, dinda0308233096@uinsu.ac.id⁴,
indaharahap77@gmail.com⁵, sitisyahirah0308233115@uinsu.ac.id⁶

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi signifikan pada pemahaman implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini mengadopsi pendekatan survei Nasional, khususnya nilai-nilai Pancasila dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Proses pencarian literatur dilakukan secara online menggunakan sumber dari Google Scholar. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya menjadi dasar hukum, melainkan juga menjadi jiwa bangsa Indonesia yang tercermin dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat, cita-cita, dan pandangan hidup.

Kata kunci: Pancasila, Paradigma, Pembangunan, Nasional

ABSTRACT

This research aims to make a significant contribution to the understanding of the implementation of Pancasila values in national development. The method used in writing this journal adopts the National survey approach, especially the values of Pancasila in achieving national development goals. The literature search process was conducted online using sources from Google Scholar. This research shows that Pancasila is not only the basis of law, but also the soul of the Indonesian nation which is reflected in the values of community life, ideals, and outlook on life.

Keywords: Pancasila, Paradigm, Development, National

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses yang mengedepankan dinamisme nasional dan berdampak merata pada seluruh aspek kehidupan masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya pada kelompok atau sebagian masyarakat saja. Pembangunan nasional memperkokoh jati diri dan individualitas manusia, masyarakat, dan bangsa Indonesia yang tercermin dalam kehidupan yang harmonis dan seimbang berdasarkan Pancasila (Ismayawati 2018).

Pembangunan nasional Indonesia diwujudkan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang mencakup kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep pembangunan nasional dalam Pancasila mencakup berbagai nilai esensial. Sila I menitikberatkan pada kemajuan di bidang keimanan, melibatkan tanggung jawab bersama untuk membangun landasan spiritual, moral, dan etika yang

kuat. Sila kedua mencakup peningkatan harkat dan martabat, hak asasi manusia, serta kewajiban masyarakat, dengan tujuan menghapuskan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Sila ketiga mendorong pembangunan kebhinnekaan lapisan masyarakat Indonesia, dengan fokus pada penguatan persatuan dan kesatuan ras serta bangsa. Sila keempat menyoroti pembangunan politik demokrasi Pancasila, menjaga stabilitas dinamis negara, dan mendorong partisipasi politik rakyat (Wahyuningsih et al. 2021).

Sila kelima mencakup pembangunan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, memberikan kontribusi pada kesejahteraan yang adil dalam sistem perekonomian yang berlandaskan asas kekeluargaan. Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila diarahkan pada peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan terencana, menyeluruh, tepat sasaran, bertahap, dan berkelanjutan (Md Safian 2007).

Pembangunan nasional memiliki tujuan utama, yaitu menjamin keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungan hidup. Upaya ini merupakan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, dengan masyarakat sebagai pelaku utama dan pemerintah memiliki kewajiban memimpin, membimbing, dan menciptakan suasana kooperatif (Syarbaini 2017).

Cita-cita nasional Indonesia, seperti yang tercantum dalam Lentera Pancasila, mencakup peningkatan kesejahteraan, peningkatan taraf hidup, partisipasi dalam perdamaian dan keadilan sosial, serta kebebasan berekspresi. Negara Indonesia, sebagai negara kesejahteraan, bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya melalui berbagai kebijakan publik, termasuk kebijakan ekonomi dan sosial, untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.

Pembangunan hukum yang berkelanjutan menjadi implementasi dari tekad negara Indonesia dalam mewujudkan konsep negara kesejahteraan. Ideologi persatuan bangsa menjadi landasan dalam mengelola dan mengatur administrasi nasional yang mencakup seluruh fungsi masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan hukum nasional yang berkelanjutan diharapkan dapat mencerminkan cita-cita dan nilai-nilai Pancasila.

Dengan demikian, pembangunan nasional Indonesia berdasarkan Pancasila adalah upaya komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat. Melalui sinergi antara nilai-nilai Pancasila, partisipasi masyarakat, dan kebijakan pemerintah, diharapkan terwujud kemajuan, kesejahteraan, perdamaian, keadilan, dan kebebasan berekspresi dalam bingkai negara yang berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila.

Pembangunan nasional Indonesia yang berbasis Pancasila menandai komitmen pemerintah untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh masyarakat. Sejak kemerdekaan, pembangunan ini telah menjadi fokus utama, namun pelaksanaannya belum selalu mencapai hasil optimal. Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat menuntut pemahaman mendalam terhadap peran Pancasila dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi konsep-konsep krusial seperti kemajuan keimanan, peningkatan harkat dan martabat, kebhinnekaan, demokrasi Pancasila, dan keadilan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi signifikan pada pemahaman implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Melalui identifikasi permasalahan dan solusi konstruktif, penelitian ini diharapkan menjadi panduan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pembangunan nasional.

Harapannya, penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Dengan mendalaminya aspek-aspek kunci implementasi Pancasila, diharapkan pemahaman yang lebih baik dapat tercipta di kalangan pembuat kebijakan, masyarakat, dan pihak terkait.

Melalui temuan dan rekomendasi, penelitian ini bermaksud menjadi pendorong perubahan positif dalam arah pembangunan nasional. Diharapkan pula hasil penelitian ini menjadi rujukan ilmiah yang bermanfaat bagi peneliti, akademisi, dan praktisi pembangunan. Secara keseluruhan, penelitian ini berambisi memberikan kontribusi positif dan berkelanjutan terhadap pengembangan teori dan praktik pembangunan nasional berdasarkan Pancasila, dengan harapan bahwa hasilnya akan menjadi dasar untuk perubahan positif dalam kebijakan nasional, meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkeadilan (Agency et al. 2006).

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Pancasila

Pancasila, sebagai falsafah dasar Negara Indonesia, tampil dalam Pembukaan UUD 1945 dan memiliki peran sentral dalam membentuk identitas dan nilai-nilai kebangsaan. Kewajiban setiap warga Negara Indonesia untuk mempelajari, memahami, menginternalisasi, dan mengamalkannya mencerminkan pentingnya Pancasila sebagai pedoman moral dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, sejarah perjalanan kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa persepsi dan interpretasi terhadap Pancasila tidak selalu konsisten, seringkali dipengaruhi oleh kepentingan rezim yang berkuasa.

Selama sejarahnya, Pancasila telah diartikan secara berbeda-beda sesuai dengan agenda politik penguasa. Pemerintahan Orde Baru, sebagai contoh, menggunakan Pancasila sebagai alat untuk mengekang oposisi dan memaksa rakyat setia kepada pemerintah yang berkuasa. Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, mengarah pada seragamnya pemikiran dan ideologi dalam masyarakat yang sebenarnya bersifat pluralistik.

Pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) melalui sidang Istimewa MPR tahun 1998, dengan Tap. No.XVII/MPR/1998, menjadi langkah signifikan dalam merevitalisasi peran Pancasila. Keputusan tersebut menetapkan Pancasila sebagai dasar Negara, menandakan upaya untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber inspirasi dan panduan dalam kehidupan bernegara. Pergeseran ini mengisyaratkan perlunya konsistensi pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga integritas dan karakter bangsa.

Penting untuk dicatat bahwa Pancasila, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, bukan hanya merupakan slogan retorik, melainkan dasar Negara yang harus diimplementasikan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Implementasi Pancasila ini tidak hanya mencakup aspek formalitas atau doktriner, tetapi lebih pada pemahaman mendalam, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya pemerintahan Orde Baru untuk menyatukan perspektif ideologis dalam masyarakat yang pluralistik menciptakan tantangan besar dalam memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila. Hal ini menciptakan ketidakselarasan antara retorika dan praktik, di mana Pancasila lebih sering diartikan sebagai instrumen politik ketimbang panduan moral. Oleh karena itu, perubahan paradigma pada tahun 1998 menjadi peluang untuk mengembalikan esensi sejati Pancasila sebagai sumber inspirasi dan pedoman dalam kehidupan bernegara.

Melalui perubahan ini, diharapkan Pancasila dapat menjadi kekuatan penyatuan dan pembangunan, menghargai keberagaman masyarakat Indonesia. Pendidikan Pancasila perlu diperkuat untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila, dan mampu mengaplikasikannya dalam tindakan sehari-hari. Hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, lembaga pendidikan, dan elemen-elemen sosial lainnya.

Dalam konteks globalisasi, pemahaman terhadap Pancasila tidak boleh terbatas pada tingkat nasional saja, tetapi juga diarahkan pada perspektif internasional. Pendidikan Pancasila harus mencakup pandangan global untuk mempersiapkan warga negara Indonesia menjadi bagian dari masyarakat dunia yang berdampingan dan berinteraksi.

Dengan demikian, revitalisasi Pancasila sebagai dasar Negara memerlukan upaya bersama dari seluruh elemen masyarakat. Ini melibatkan perbaikan sistem pendidikan, penguatan peran lembaga-lembaga sosial, dan pembentukan karakter Pancasila yang kuat di tengah-tengah masyarakat. Hanya dengan konsistensi, pemahaman mendalam, dan penghayatan nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan, sesuai dengan visi dan misi kemerdekaan yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa (Kurniawan and Rochmadhona 2021).

Pendidikan Pancasila

Pendidikan nasional di Indonesia memegang peranan vital dalam membentuk karakter dan identitas bangsa. Dalam tingkat nasional, melalui Majelis Perwakilan, pendidikan nasional diamanatkan untuk bersumber pada kebudayaan bangsa Indonesia dan nilai-nilai yang mendasarinya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan serta martabat bangsa, menciptakan individu dan masyarakat yang beriman dan bertakwa, berkualitas, dan mandiri. Pendidikan nasional diharapkan dapat membentuk individu yang mampu membangun dirinya sendiri dan masyarakat sekitarnya, serta memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan bangsa (Lestari and Kurnia 2022).

Pendidikan Pancasila diarahkan untuk fokus pada aspek moral yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup perilaku yang mencerminkan iman dan takwa kepada Tuhan YME di tengah masyarakat yang beragam agama. Pendidikan Pancasila juga menitikberatkan pada perilaku kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan, dan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan atau golongan. Dengan demikian, pendidikan Pancasila bertujuan untuk mengatasi perbedaan pemikiran, pendapat, dan kepentingan melalui penerapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Putu, Giri, and Luh Ardini 2021).

Tujuan nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, mencakup melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pelaksanaan tujuan nasional ini menekankan prinsip berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan memprioritaskan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Penyelenggaraan Negara yang dilaksanakan oleh lembaga tertinggi dan lembaga tinggi Negara bersama-sama rakyat Indonesia di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia menjadi kunci pelaksanaan tujuan nasional. Pembangunan nasional, sebagai bagian integral dari tujuan tersebut, merupakan upaya peningkatan

kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Pembangunan nasional di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan memiliki kekuatan moral dan etika. Dalam konteks ini, peran Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa sangat penting dalam menentukan tercapainya tujuan nasional. Pancasila bukan hanya menjadi landasan moral, tetapi juga menjadi panduan bagi setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendidikan nasional Indonesia yang berakar pada kebudayaan bangsa dan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional memiliki peran strategis dalam membentuk karakter bangsa. Dengan pendidikan Pancasila yang mengajarkan nilai-nilai moral, kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan, diharapkan setiap warga negara dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Tujuan nasional yang mencakup perlindungan bangsa, peningkatan kesejahteraan umum, dan pencerdasan kehidupan bangsa dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan Negara yang demokratis, berdasarkan Pancasila, dan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pembangunan nasional harus memanfaatkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral yang tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman dan tantangan global. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, dan maju, sejalan dengan cita-cita kemerdekaan yang diamanatkan oleh pendiri bangsa. Oleh karena itu, peran Pancasila dalam pendidikan dan pembangunan nasional harus terus diperkuat dan diaktualisasikan dalam setiap lapisan masyarakat, sehingga Indonesia mampu bersaing dan berkontribusi positif dalam tatanan dunia yang semakin kompleks (Lesmana 2018).

Paradigma Pembangunan Nasional Paradigma pembangunan nasional adalah pondasi, metode, dan sasaran pembangunan suatu bangsa dalam mencapai kemajuan holistik. Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional, mengingat nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan kehidupan sosial dan budaya bangsa. Hal ini mencerminkan hasil perjuangan kolektif dan kesepakatan nasional, memvisualisasikan cita-cita dan tujuan bersama.

Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, memainkan peran sentral dalam membimbing berbagai aspek pembangunan nasional. Konsep ini mengimplikasikan bahwa seluruh dimensi pembangunan nasional harus tertanam pada nilai-nilai Pancasila. Dengan tujuan utama meningkatkan harkat dan martabat manusia, pembangunan nasional melibatkan aspek-aspek seperti rohani, jasmani, individu, sosial, dan ketuhanan.

Contoh penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dapat dijumpai dalam berbagai sektor. Dalam bidang ekonomi, pembangunan berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan menekankan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, kemandirian, kerjasama, dan tanggung jawab moral. Program-program seperti koperasi, UMKM, BUMN, BUMDes, subsidi bagi rakyat miskin, merupakan contoh nyata implementasi nilai-nilai ekonomi Pancasila.

Di ranah politik, pembangunan politik mengacu pada prinsip demokrasi Pancasila yang menjamin kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, persatuan dan kesatuan nasional, serta keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah. Penyelenggaraan pemilu, reformasi birokrasi, dan otonomi daerah adalah upaya nyata mewujudkan prinsip-prinsip politik Pancasila.

Sementara itu, dalam bidang hukum, pembangunan didasarkan pada prinsip supremasi hukum yang menjamin perlindungan hukum tanpa diskriminasi, penegakan

hukum yang adil, tegas, dan reformasi hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman. Upaya pemberantasan korupsi, perlindungan hak asasi manusia, dan revisi undang-undang kontroversial adalah contoh implementasi nilai-nilai hukum Pancasila (Ismaya and Belakang 2009).

Pembangunan sosial budaya, sebagai dimensi penting, berlandaskan prinsip gotong royong, toleransi, kebhinekaan, serta pengembangan potensi dan kreativitas masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, serta pengembangan pendidikan dan kesehatan mencerminkan komitmen pada nilai-nilai sosial budaya Pancasila ("Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan - Roflin Musa - Universitas Negeri Gorontalo," n.d.).

Dalam sektor pertahanan dan keamanan, pembangunan didasarkan pada prinsip bela negara, melibatkan seluruh komponen bangsa dalam menjaga kedaulatan dan integritas negara dari ancaman luar dan dalam negeri. Program wajib militer, peningkatan alutsista TNI-Polri, serta penanganan terorisme dan separatisme menjadi contoh implementasi nilai-nilai pertahanan dan keamanan Pancasila.

Penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional menciptakan kerangka kerja yang holistik dan komprehensif, memandu berbagai inisiatif dan kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia. Melalui integrasi nilai-nilai Pancasila, diharapkan masyarakat Indonesia dapat membangun negara yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing, sesuai dengan visi dan misi pembangunan nasional yang diemban oleh bangsa ini (Idris 2010).

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini mengadopsi pendekatan survei Nasional, khususnya nilai-nilai Pancasila dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Proses pencarian literatur dilakukan secara online menggunakan sumber dari Google Scholar. Kata kunci yang diaplikasikan dalam pencarian ini adalah "Pembangunan Nasional" AND "Pancasila". Penggunaan Boolean Operator, dengan kata "AND", digunakan untuk menggabungkan konsep yang berbeda dan membatasi cakupan pencarian artikel agar lebih terfokus. Sumber-sumber informasi yang relevan juga diperoleh melalui web resmi "Bappeda" dan "BPIP".

Setelah melakukan pencarian, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi, menghimpun, dan mendata artikel-artikel yang dianggap relevan kedalam sebuah tabel. Pemilihan artikel dilakukan secara cermat dan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini tidak hanya mengandalkan literatur dari sumber-sumber akademis, tetapi juga memanfaatkan data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia memiliki peran krusial dalam mengatur segala aspek kehidupan bangsa, termasuk tatanan pendidikan, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 20 tahun 2003 Bab 2 tentang sistem pendidikan nasional. Pancasila bukan hanya menjadi dasar hukum, melainkan juga menjadi fondasi dari pendidikan nasional di Indonesia, mencerminkan "warisan jenius" dari para pendiri bangsa. Dalam proses perumusannya, Pancasila diakui sebagai hasil sejarah yang bermakna dan memiliki tujuan sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka.

Etimologis kata "Pancasila" berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu "panca" yang berarti lima, dan "sila" yang berarti dasar, prinsip, atau asas. Jadi, Pancasila secara

harfiah berarti lima dasar. Secara terminologi, Pancasila dianggap sebagai falsafah dan dasar negara Indonesia, yang juga memiliki makna sebagai rumusan dan pedoman fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pentingnya memahami Pancasila dari sudut pandang falsafah menjadi langkah awal bagi seseorang yang ingin mengkaji lebih dalam nilai-nilai Pancasila. Setiap negara memiliki dasar falsafah sebagai panduan arah dan tujuan yang ingin dicapai, dan dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi jiwa bangsa yang tercermin dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat, cita-cita, dan pandangan hidup. Psikologi Pancasila mencakup sikap dan perilaku ber-Pancasila yang diharapkan dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Studi psikologis menunjukkan bahwa identitas religius bukanlah penghalang, melainkan penguat keber-Pancasilaan remaja Indonesia.

Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebuah konsep hukum, melainkan juga merupakan identitas dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam konteks psikologis, keber-Pancasila-an tercermin dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai karakter yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila menjadi pedoman yang mewarnai berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila Sebagai Pembangunan Indonesia

Pancasila, sebagai landasan filosofis sejarah nasional Indonesia, mencakup dimensi statika dan dinamika yang memandu segala aspek kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaannya, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Revitalisasi atau kebangkitan Pancasila menjadi fokus program pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh warga negara Indonesia.

Pancasila memiliki peran krusial sebagai landasan negara, ideologi, dan filsafat, mencerminkan prinsip dasar negara Indonesia merdeka. Dalam fungsi praktisnya, Pancasila menjadi pedoman tindakan subyektif individu, mewujudkan kehidupan harmonis antarwarga negara dengan berbagai latar belakang suku dan agama. Sebagai dasar negara, Pancasila mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, menjadikannya landasan utama yang mengarah pada masyarakat yang adil dan makmur, baik secara lahir maupun batin.

Dalam ranah hukum di Indonesia, Pancasila menjadi sumber dari segala hukum yang berlaku. Status hukum Pancasila berada pada tingkat hukum tertinggi, menjadi norma dasar yang mengatur seluruh sistem hukum di Indonesia. Meskipun Indonesia pernah menjadi jajahan Belanda, hukum waris Belanda masih sulit diselaraskan dengan budaya gotong royong di Indonesia.

Pembangunan di Indonesia juga mengandalkan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan utama. Pembangunan, sebagai proses perubahan ekonomi, sosial, dan budaya, bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur materiil serta spiritual berdasarkan Pancasila. Dalam pelaksanaannya, sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal, dan teknologi menjadi faktor-faktor krusial yang memengaruhi kemajuan pembangunan nasional.

Pada akhirnya, Pancasila bukan hanya sebuah konsep hukum atau filsafat semata, melainkan juga identitas dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam konteks psikologis, keber-Pancasila-an tercermin dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai karakter yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dengan menjunjung nilai-nilai Pancasila, diharapkan Indonesia dapat mencapai cita-cita sebagai bangsa yang adil, makmur, dan harmonis.

Paradigma Pembangunan Nasional

Paradigma pembangunan nasional menjadi suatu landasan filosofis yang memandu perjalanan sebuah bangsa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di berbagai sektor kehidupan. Menyeluruh, paradigma ini mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dalam kerangka ini, Pancasila menduduki peran sentral sebagai panduan utama yang membimbing pembangunan nasional.

Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, memancarkan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan konteks sosial dan budaya. Sebagai hasil perjuangan dan kesepakatan bersama, Pancasila merefleksikan aspirasi dan tujuan nasional yang menjadi pilar utama pembangunan. Sebagai paradigma pembangunan nasional, Pancasila bukan sekadar doktrin tetapi menjadi fondasi, metode, nilai-nilai, dan tujuan yang diterapkan dalam setiap inisiatif pembangunan.

Penerapan paradigma ini bersifat holistik, meresap ke berbagai sektor kehidupan, mencakup ekonomi yang berkeadilan, politik yang demokratis, sistem hukum yang adil, keberagaman budaya yang dihargai, serta pertahanan dan keamanan yang kokoh. Paradigma nasional Indonesia, yang melibatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional, menjadi kerangka kerja yang merinci langkah-langkah untuk mencapai tujuan nasional.

Keempat fondasi paradigma nasional tersebut, jika digarap secara komprehensif, akan memberikan jaminan keberhasilan tujuan nasional, termasuk di dalamnya tujuan kesehatan sebagai komponen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Paradigma nasional juga berperan sebagai ukuran untuk mengevaluasi sejauh mana kondisi status kesehatan Bangsa Indonesia sejalan dengan tujuan nasional.

Dalam suatu konteks riset, penelitian ini dilakukan untuk mengukur pemahaman mahasiswa UIN Sumatera Utara tentang paradigma pembangunan nasional. Hal ini tidak hanya menjadi langkah kritis untuk menjaga keselarasan dengan tujuan nasional Indonesia tetapi juga sebagai bentuk investasi dalam mencetak generasi yang memiliki pemahaman mendalam terhadap fondasi pembangunan negara.

Konsep kemajuan keimanan menjadi titik sentral dalam memahami landasan spiritual pembangunan nasional Indonesia. Keimanan sebagai nilai fundamental dalam Pancasila membentuk dasar spiritual yang mengarahkan arah dan tujuan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendalaminya dengan menganalisis sejauh mana konsep kemajuan keimanan diimplementasikan dalam strategi pembangunan nasional. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul mencakup sejauh mana keimanan menjadi pendorong dalam merancang kebijakan pembangunan dan bagaimana implementasinya memengaruhi aspek spiritual masyarakat.

Penelitian ini membahas secara mendalam bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia, melindungi hak asasi manusia, serta memahami kewajiban masyarakat. Rumusan masalah penelitian mencakup sejauh mana implementasi nilai-nilai Pancasila memengaruhi peningkatan kualitas hidup manusia, perlindungan hak-hak dasar individu, dan tanggung jawab kolektif masyarakat dalam mencapai

Melalui penelitian ini, dilakukan evaluasi terhadap peran kebhinnekaan sebagai faktor penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan ras serta bangsa. Rumusan masalah penelitian akan membahas sejauh mana keberagaman budaya,

suku, dan agama berkontribusi dalam menguatkan jalinan persatuan dalam masyarakat. Evaluasi ini juga akan mengeksplorasi dampak positif kebhinnekaan terhadap identitas nasional.

Penelitian ini mencakup kajian mendalam terhadap pembangunan politik demokrasi Pancasila sebagai penjaga stabilitas dinamis negara. Pertanyaan penelitian akan merinci sejauh mana sistem politik demokratis Pancasila mampu menjaga stabilitas dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Analisis ini mencakup aspek peran Pancasila dalam membentuk proses demokrasi yang inklusif dan berkesinambungan.

Penelitian ini menguraikan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai keadilan ekonomi dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Rumusan masalah penelitian mencakup evaluasi sejauh mana kebijakan ekonomi yang diimplementasikan mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila dalam menjamin pemerataan kekayaan dan peluang ekonomi. Analisis ini juga melibatkan penilaian terhadap dampak sosial dan ekonomi dari upaya tersebut terhadap masyarakat.

Dalam keseluruhan, penelitian ini mengusung pendekatan holistik dalam membahas konsep kemajuan keimanan, implementasi nilai-nilai Pancasila, peran kebhinnekaan, pembangunan politik demokrasi Pancasila, dan upaya mencapai keadilan ekonomi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memahami dinamika dan tantangan pembangunan nasional Indonesia, khususnya dalam konteks spiritual, sosial, politik, dan ekonomi.

Kesimpulan

Gambaran holistik tentang peran Pancasila dalam mengarahkan pembangunan nasional Indonesia. Penelitian ini menyoroti aspek-aspek krusial, termasuk konsep kemajuan keimanan, implementasi nilai-nilai Pancasila, peran kebhinnekaan, pembangunan politik demokrasi Pancasila, dan upaya mencapai keadilan ekonomi.

Dalam mengevaluasi konsep kemajuan keimanan, penelitian ini mengidentifikasi bahwa keimanan, sebagai nilai fundamental dalam Pancasila, memberikan landasan spiritual yang mengarahkan arah dan tujuan pembangunan nasional. Implementasi nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi pedoman tindakan individu tetapi juga solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Pentingnya keber-Pancasila-an dalam aspek psikologis muncul sebagai identitas dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sikap, perilaku, dan nilai-nilai karakter yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia mencerminkan keber-Pancasila-an, yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila bukan hanya sebuah konsep hukum atau filsafat semata, melainkan juga menjadi paradigma pembangunan nasional. Sebagai dasar negara, ideologi, dan filsafat, Pancasila menjadi panduan utama dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur baik secara lahir maupun batin. Revitalisasi Pancasila menjadi fokus program pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh warga negara Indonesia.

Paradigma pembangunan nasional, yang melibatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional, menjadi kerangka kerja komprehensif yang merinci langkah-langkah untuk mencapai tujuan nasional. Paradigma ini mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan, menjadikan Pancasila sebagai panduan utama yang membimbing pembangunan nasional.

Dalam konteks riset, pemahaman mahasiswa UIN Sumatera Utara tentang paradigma pembangunan nasional diukur untuk menjaga keselarasan dengan tujuan nasional Indonesia dan sebagai investasi dalam mencetak generasi yang memiliki pemahaman mendalam terhadap fondasi pembangunan negara.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya menjadi dasar hukum, melainkan juga menjadi jiwa bangsa Indonesia yang tercermin dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat, cita-cita, dan pandangan hidup. Dengan menjunjung nilai-nilai Pancasila, diharapkan Indonesia dapat terus menuju cita-cita sebagai bangsa yang adil, makmur, dan harmonis. Penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam memahami dinamika dan tantangan pembangunan nasional Indonesia dalam konteks spiritual, sosial, politik, dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agency, The Countryside, ICF Consulting, DEPARTMENT OF WATER AND SANITATION, Residential Infill, Workshop Iii, Medium Scale June, Street Lititz, et al. 2006. "Pancasila Sebagai Dasar Dan Ideologi Bangsa." *Transportation* 1 (January): 21–30. <https://doi.org/10.1002/ejoc.201200111>.
- Idris, Fachmi. 2010. "Implementasi Paradigma Nasional Dalam Bidang Menuju Tercapainya Indonesia Sehat." http://eprints.unsri.ac.id/315/1/16._PARADIGMA_NASIONAL_KESEHATAN.pdf.
- Ismaya, Heru, and Latar Belakang. 2009. "Pancasila Sebagai Sumber Inspirasi Paradigma."
- Ismayawati, Any. 2018. "Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8 (1): 53. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3231>.
- Kurniawan, Ardhian Tomy, and Imam Aji Rochmadhona. 2021. "ANALISIS PARADIGMA PERUSAHAAN BERBASIS EKONOMI PANCASILA DI INDONESIA." *Minat Siswa Sd Negeri Jatipuro Terhadap Olahraga Futsal* 1 (6): 903. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/621>.
- Md Safian, Mohd Tajuddin. 2007. "Pembangunan Nasional Indonesia Adalah." *Revista Brasileira de Ergonomia* 9 (2): 10. <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>.
- Syarbaini, Syahrial. 2017. "Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Tinjauan Implementasi Pancasila Dalam Sistem Ekonomi." *Tinjauan Implementasi Pancasila Dalam Sistem Ekonomi) Forum Ilmiah* 14: 126.
- Wahyuningsih, Sri, Sri Husnulwati, Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, and Jurnal Education. 2021. "Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dalam Kaitan Nilai – Nilai Pancasila Kearah Tujuan Pembangunan." *Jurnal Education and Development* 9 (3): 415–21.